

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Ramos sebagai Juru Cekal

PRESIDEN Ramos dari Filipina akhirnya membuat keputusan. Ia tidak membubarkan konferensi tentang Timor Timur di Manila. Tetapi, mencekal para undangan asing untuk mengikuti acara internasional itu. Dengan tindakan itu, Ramos berharap bisa menyenangkan pihak asing yang menekan pemerintahannya. Dan, sekaligus ia merasa berhasil berakrobatik di dalam negeri sendiri.

PERBEDAAN DALAM KESEPAKATAN

Kita belum tahu apakah keputusan itu tidak akan menimbulkan sengketa baru dalam negeri Filipina sendiri. Se jauh mana tindakan itu dapat dibenarkan oleh konstitusi dan diterima oleh rakyatnya.

Bila diberlakukan secara tegas dan dipatuhi semua pihak, keputusan Ramos itu akan memberikan kesan, jika bukan bukti masih berlakunya semacam hukum rimba dalam sejarah mutakhir bangsa-bangsa modern di dunia. Kesewenangan-wenangan menjadi tirani kekuasaan. Kehormatan hanya milik mereka yang kaya dan kuat. Kebenaran hanya milik mereka yang boleh berbicara. Dan, kebebasan berbicara adalah monopoli mereka yang berkuasa.

Sejak awal kebangkitan Indonesia berkali-kali mengalami tekanan dari negara-negara adikuasa. Termasuk dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Lepas dari nilai baik/buruknya, kenyataannya

pemerintah Orde Baru beberapa kali kewalahan menghadapi tekanan dari luar negeri. Misalnya dalam soal hak-hak asasi, transmigrasi, lingkungan hidup, buruh, emansipasi wanita. Juga soal Timor Timur. Banyak dari tekanan itu diterima dan dipatuhi, tetapi tidak dengan sukarela atau mufakat.

Kini dunia menyaksikan bagaimana Indonesia melakukan tekanan dan ancaman serupa terhadap pemerintahan Ramos yang kelihatan kehilangan nyali. Pada gilirannya pemerintahan Ramos melakukan penekanan serupa terhadap pihak yang lebih kecil dan lemah. Yakni, warga bangsa Filipina yang terhipunkan dalam sebuah komunitas akademik yang menjadi tuan rumah konferensi kontroversial itu.

Seandainya konferensi di Manila itu dibiarkan berlangsung, hasilnya mungkin bermutu dan mengesankan orang lain. Mungkin juga tidak. Kita dapat memperdebatkannya. Tetapi kini, karena dilakukan pencekalan, hasilnya tidak utuh. Bila ada cacat, maka pihak pemerintahan di Filipina maupun Indonesia mudah dipersalahkan oleh penyelenggara sebagai penyebabnya.

Pencekalan, apalagi pembubaran, konferensi itu secara politis akan selalu menguntungkan pihak korban. Seakan-akan ada yang kebenaran yang tidak dapat disanggah oleh pemerintah, sehingga berusaha menutup-nutupinya. Bila perlu dengan cekal. Padahal, kebenaran yang ingin diajukan konferensi itu masih



belum ada, apalagi lulus ujian perdebatan. Suatu pencekalan sudah membenarkan si korban, tanpa si korban berusaha membenarkan dirinya sendiri.

Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju pada konferensi di Manila itu. Ini hal yang wajar. Seperti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju diadakannya SDSB, ICKI atau sidang pengadilan terhadap para mahasiswa demonstran di Jakarta. Untuk itulah, sebuah masyarakat modern membutuhkan kesepakatan dan peradaban anti-kekerasan. Agar kita dapat hidup saling menghormati perbedaan pandangan tanpa saling membunuh atau membungkam. Kita dapat memperjuangkan kebenaran lewat ujian perdebatan terbuka yang sehat. Kita memelihara kebebasan untuk tidak sepakat secara damai. Untuk itulah, Pancasila dirumuskan bagi kita di Indonesia.

SIAPA YANG MENANG

Mungkin ada yang merasa menang dengan keluarnya keputusan Ramos. Boleh saja. Tetapi sulit jika perasaan menang itu dikait-kaitkan, apalagi diidentikkan dengan kepentingan nasional. Entah itu untuk Indonesia atau Filipina. Pencekalan terhadap kegiatan yang tidak pernah bersifat kriminal dan tidak

melakukan kekerasan sulit dibenarkan dengan slogan-slogan di universitas terkemuka yang dilindungi konstitusi negara penyelenggara.

Nasionalisme dalam bentuk awalnya memperjuangkan kemerdekaan (berbicara dan berseikat) tidak saja bagi bangsa sendiri. Tetapi bagi semua bangsa di dunia. Termasuk sesama bangsa-bangsa terjajah, tetapi juga bagian-bagian dari masyarakat yang hidup di negeri penjajah sendiri. Juga bagi mereka yang di Eropa Timur, Timur Tengah, Filipina, Moro, Timor Timur. Setiap kampung serta seluruh bagian dari wilayah Indonesia bahkan dunia.

Apa yang diperjuangkan nasionalisme bersifat universal dan internasional. Nasionalisme Indonesia diperjuangkan bukan untuk memusnahkan bangsa Belanda atau bangsa apa pun di muka bumi ini. Sebab, seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. "Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa".

Kita layak mencegah konferensi atau gerakan dari mana pun datangnya bila kegiatan itu dimaksud memusnahkan atau menjajah bangsa lain. Apalagi jika sasaran yang diincar adalah bangsa kita sendiri. Tetapi cara pencegahan itu tetap layak menghormati nilai yang hendak kita lindungi dan junjung. Yakni peradaban, keadilan, dan kemanusiaan (Pembukaan UUD 1945).

Menggagalkan sebuah konferensi di negeri mana pun bila dicapai lewat ancaman balas

dendam, atau pencekalan yang bersifat memaksa sulit dipadukan dengan aspirasi nasionalisme macam apa pun. Yang justru jatuh sebagai korban adalah aspirasi nasionalisme dan internasionalisme (peradaban, keadilan, dan kemanusiaan). Itulah bedanya nasionalisme dan sebuah pertandingan olahraga antar-negara.

Dapat dimaklumi bila pemerintah Indonesia menyambut gembira keputusan Ramos. Walaupun hal itu masih sulit dikaitkan dengan kepentingan nasional Indonesia, yang lebih sulit dipahami adalah sikap Ramos sendiri. Terlebih-lebih lagi bila Ramos mengatasnamakan "kepentingan nasional" untuk membenarkan tindakannya.

Jika yang dimaksud Ramos adalah kepentingan bangsa Filipina, maka layak dipertanyakan mengapa perjuangan "kepentingan nasional" itu tidak datang dari *nasion* Filipina sendiri. Bahkan hal itu justru mengancam tokoh-tokoh dalam bangsa Filipina yang menjadi tuan rumah konferensi. Mengapa "kepentingan nasional" yang disebut Ramos perlu dibisikkan dari Jakarta?

Bulan lalu Ramos perlu menyelenggarakan semacam SDSB yang diprotes rakyatnya. Di Indonesia undian itu sudah hia-pus. Bulan ini Ramos mencicipi pencekalan yang justru digugat rakyat Indonesia.

* Ariel Heryanto, staf pengajar UKSW Salatiga.